

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH
PEKERJA YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS**



Diajukan Oleh:

**DIANA PRATIWI STYANINGSIH
NIM. 2220216320012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2024**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH
PEKERJA YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS**



Diajukan Oleh:

**DIANA PRATIWI STYANINGSIH
NIM. 2220216320012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA
YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

**DIANA PRATIWI STYANINGSIH
NIM. 2220216320012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2024**

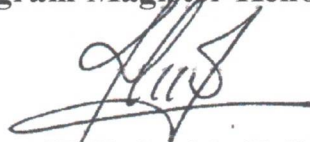
**Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....**

PEMBIMBING



**Saprudin
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Pogram Magister Kenotariatan**



**Hj. Rahmida Erliyani
NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum**



**Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Pratiwi Styaningsih
NIM : 2220216320012
Program Studi : Magister Hukum Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Diana Pratiwi Styaningsih

NIM. 2220216320012

DIANA PRATIWI STYANINGSIH. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 103 Halaman.

RINGKASAN

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengaturan pengupahan yang layak bagi kemanusiaan disamping penegakan hukum agar masyarakat luas mengetahui dinamika hukum ketenagakerjaan. Dalam pekerjaannya Notaris juga membutuhkan bantuan secara profesional. Adanya pekerja atau karyawan, Notaris dapat melayani kebutuhan kliennya dengan cepat serta tepat pada waktunya. Pekerja pada kantor notaris memiliki peran yang besar untuk mendukung dan menjalankan kegiatan atau pekerjaan seorang Notaris. Pekerja/buruh yang bekerja di kantor notaris berhak atas upah yang layak sebagai seorang pekerja, yang tentunya diatur tidak hanya dalam konstitusi maupun dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara notaris dan pekerja yang bekerja di kantor notaris serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap upah pekerja yang bekerja di kantor notaris. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam bidang hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hubungan hukum antara notaris dengan pekerja yang bekerja di kantor notaris adalah berdasarkan hubungan kerja, karena sudah memenuhi unsur-unsur dari hubungan kerja yakni adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Unsur adanya

pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja di kantor notaris, adanya perintah baik secara langsung maupun tidak langsung dari notaris dan adanya unsur upah yang diberikan notaris terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Hubungan kerja tersebut bersumber dari perjanjian kerja yang dibuat oleh notaris dengan pekerja. Perjanjian kerja tersebut berdasarkan bentuknya dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Adapun berdasarkan jangka waktu perjanjian tersebut dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Perlindungan terhadap upah pekerja yang bekerja di kantor notaris adalah apabila jenis usaha yang dilakukan notaris sudah tidak termasuk kriteria usaha mikro dan kecil, maka upah yang dibayarkan terhadap pekerja yang bekerja di kantor notaris harus berdasarkan ketentuan upah minimum. Selain itu, di dalam melakukan pekerjaannya pekerja yang bekerja di kantor notaris upahnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni ada pengecualian-pengecualian terhadap azas *no work no pay*, hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) yakni diantaranya pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dan pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.

DIANA PRATIWI STYANINGSIH. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 103 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah Pekerja, Kantor Notaris

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara notaris dan pekerja yang bekerja di kantor notaris serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap upah pekerja yang bekerja di kantor notaris.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, hubungan hukum antara notaris dengan pekerja yang bekerja di kantor notaris adalah berdasarkan hubungan kerja, karena sudah memenuhi unsur-unsur dari hubungan kerja yakni adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Unsur adanya pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja di kantor notaris, adanya perintah baik secara langsung maupun tidak langsung dari notaris dan adanya unsur upah yang diberikan notaris terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Hubungan kerja tersebut bersumber dari perjanjian kerja yang dibuat oleh notaris dengan pekerja. Perjanjian kerja tersebut berdasarkan bentuknya dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Adapun berdasarkan jangka waktu perjanjian tersebut dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, Perlindungan terhadap upah pekerja yang bekerja di kantor notaris adalah apabila jenis usaha yang dilakukan notaris sudah tidak termasuk kriteria usaha mikro dan kecil, maka upah yang dibayarkan terhadap pekerja yang bekerja di kantor notaris harus berdasarkan ketentuan upah minimum. Selain itu, di dalam melakukan pekerjaannya pekerja yang bekerja di kantor notaris upahnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni ada pengecualian-pengecualian terhadap azas *no work no pay*, hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) yakni diantaranya pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dan pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.

DIANA PRATIWI STYANINGSIH. 2024. LEGAL PROTECTION OF THE WAGES OF WORKERS WORKING IN A NOTARY'S OFFICE. Notarial Masters Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 103 pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Protection, Workers' Wages, Notary Office

The aim of the research is to find out and analyze the legal relationship between notaries and workers who work in notary offices and to find out and analyze the protection of wages for workers who work in notary offices. The purpose of the thesis research entitled "The Role of the Wage Council in Realizing a Fair Minimum Wage in Industrial Relations" is to find out and analyze the regulations regarding the Wage Council before and after the enactment of the Job Creation Law, and to find out and analyze the role of the Wage Council in determining a fair minimum wage.

The research results obtained are: First, the legal relationship between a notary and workers who work in a notary's office is based on an employment relationship, because it fulfills the elements of an employment relationship, namely the elements of work, wages and orders. The element of work being carried out by workers in a notary's office, the existence of orders either directly or indirectly from the notary and the element of wages given by the notary for the work carried out by the worker. The employment relationship originates from an employment agreement made by a notary with the worker. Based on the form, the work agreement can be made orally or in writing. Based on the term of the agreement, this can be done based on a Certain Time Work Agreement (PKWT) or an Indefinite Time Work Agreement (PKWTT). Second, protection for the wages of workers who work in a notary's office is that if the type of business carried out by a notary does not include the criteria for micro and small businesses, then the wages paid to workers who work in a notary's office must be based on the minimum wage provisions. Apart from that, when carrying out their work, workers who work in notary offices have their wages protected based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment, namely that there are exceptions to the no work no pay principle, this is in accordance with what is regulated in the provisions of Article 93 paragraph (2) namely workers/laborers who are sick so they cannot do their work, female workers/laborers who are sick on the first and second day of their menstrual period so they cannot do their work and workers/laborers who do not come to work because the worker/laborer is married, married, circumcised, baptized child, wife giving birth or miscarriage, husband or wife or child or daughter-in-law or parent or mother-in-law or family member in the same household dies.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas segala anugerah dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Kenotariatan pada Program Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tesis ini banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis di dalam penulisan Tesis ini.

4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2022 Program Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ganjaran berupa pahala yang dilipatgandakan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan Tesis ini sampai selesai. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Hormat Penulis

Diana Pratiwi Styaningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS ..	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA NOTARIS DAN PEKERJA YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS	38
A. Unsur-Unsur Hubungan Kerja antara Notaris dan Pekerja	38
B. Perjanjian Kerja antara Notaris dan Pekerja.....	62
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP UPAH PEKERJA YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS.....	81
A. Upah Pekerja yang bekerja di Kantor Notaris.....	81
B. Bentuk Perlindungan Hukum Upah Pekerja di Kantor Notaris.....	88

BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA